

BAB I

PENDAHULUAN

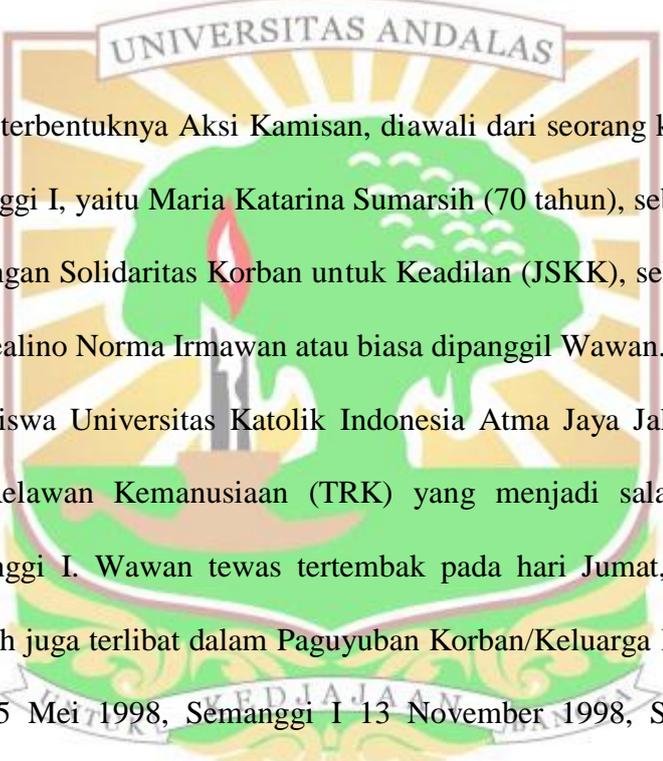
A. Latar Belakang

Pada periode akhir keruntuhan orde baru, Indonesia memasuki masa transisi demi mewujudkan iklim yang lebih demokratis. Perjuangan untuk mewujudkan reformasi, acapkali terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Beberapa di antaranya, yaitu: Tragedi Semanggi I yang terjadi pada tanggal 13 November 1998 dan Tragedi Semanggi II terjadi tanggal 24 September 1999, Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998, hingga pembunuhan Munir sebagai aktivis HAM pada tahun 2004.¹ Realitas sejarah tersebut, masih menyisakan luka yang tidak terobati hingga hari ini, sehingga korban dan keluarga korban, aktivis HAM, hingga masyarakat sipil yang memiliki keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi, secara kolektif maupun individu, masih menuntut dan menunggu kearifan atau kebijakan pemerintah untuk serius menuntaskan kasus pelanggaran HAM pada masa lampau.

Dari realitas sejarah pelanggaran HAM masa lampau, menjadi pemantik awal kemunculan Aksi Kamisan pada tahun 2007. Pada awalnya Aksi Kamisan dinamai Aksi Diam, kemudian masyarakat yang menyaksikan aksi tersebut menyebutnya dengan Aksi Payung Hitam, karena setiap melakukan aksi di Taman Aspirasi/Jl. Silang Monas Barat Laut atau tepatnya di seberang Istana Merdeka/Istana Presiden, Jl. Merdeka Utara, Jakarta Pusat, selalu membawa

¹ Fernando Randy, "Mereka yang Menuntut Keadilan" (<https://historia.id/galeri/articles/mereka-yang-menuntut-keadilan-P3Nmn/page/1>), Diakses pada Tanggal 23 Desember 2021 Pukul 22:13 WIB.

payung hitam sebagai maskot atau simbol perjuangan yang mengartikan perlindungan dan keteguhan iman. Payung dianggap sebagai pelindung fisik atas hujan dan terik matahari, dan warna hitam melambangkan keteguhan iman dalam mendambakan kekuatan dan perlindungan Illahi.² Seiring berjalannya waktu beberapa tahun kemudian, aksi ini disebut sebagai Aksi Kamisan untuk mempermudah penyebutan serta untuk penandaan masyarakat yang menyaksikan aksi sekaligus pengingat aksi rutin ini yang berlangsung tiap hari Kamis dalam satu minggu.³



Inisiasi terbentuknya Aksi Kamisan, diawali dari seorang keluarga korban Tragedi Semanggi I, yaitu Maria Katarina Sumarsih (70 tahun), sebagai salah satu Presidium Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), sekaligus ibu dari Bernardinus Realino Norma Irmawan atau biasa dipanggil Wawan. Wawan adalah seorang mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, sekaligus aktivis Tim Relawan Kemanusiaan (TRK) yang menjadi salah satu korban Tragedi Semanggi I. Wawan tewas tertembak pada hari Jumat, 13 November 1998.⁴ Sumarsih juga terlibat dalam Paguyuban Korban/Keluarga Korban Tragedi Berdarah 13-15 Mei 1998, Semanggi I 13 November 1998, Semanggi II 24 September 1999, dan TRK pada tahun 1999.⁵ TRK berganti nama menjadi

² Nia Nadia, "Mobilisasi Sumberdaya dalam Aksi Kamisan", *Skripsi*, (Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 38.

³ Penyebutan nama Aksi Kamisan yang dilakukan oleh masyarakat, sekitar tahun ke-9 Aksi Diam berlangsung.

⁴ Kompas.com, "Jumat Kelam Tragedi Semanggi 1998, Perjalanan Mencekam Bertemu Wawan" (<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/24/13255751/jumat-kelam-tragedi-semanggi-1998-perjalanan-mencekam-bertemu-wawan?page=all>), Diakses pada Tanggal 6 Juli 2022 Pukul 01:03 WIB.

⁵ Nilla Nurvian Sari, "Konstruksi Identitas Kolektif pada Gerakan-Gerakan Aksi Kamisan", *Skripsi*, (Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 5.

Jaringan Relawan Kemanusiaan (JRK) sejak tragedi Buruh Migran di Nunukan pada bulan Agustus-September 2002 dan tragedi Bom Bali Pertama Oktober 2002.⁶

Dalam Kepresidiuman JSKK, ada pula Suciwati istri dari Munir Said Thalib, seorang aktivis HAM yang tewas diracun dalam perjalanan ke Amsterdam pada tanggal 7 September 2004.⁷ Suciwati adalah seorang aktivis HAM yang terlibat dalam Yayasan Tifa dan pendiri Museum Hak Asasi Manusia, Omah Munir. Dalam Kepresidiuman ada pula Mugiyanto, sebagai korban Penghilangan Paksa 1997-1998 yang diculik pada tanggal 13 Maret 1998 di Rusun Klender, Jakarta Timur. Mugiyanto adalah salah satu pengurus Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) yang kembali dari penculikan 13 Maret 1998 oleh Tim Mawar, Kopassus.⁸ Namun seiring perjalanan JSKK, Mugiyanto memilih keluar dari JSKK dan menjadi pengurus Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI). Hal ini dikarenakan kesamaan visi-misi JSKK dan IKOHI, serta IKOHI dianggap lebih terstruktur sebagai organisasi berbadan hukum secara resmi.

Dalam mengisi kekosongan Presidium yang ditinggalkan oleh Mugiyanto, pada akhirnya ditempati oleh Bedjo Untung pada rapat kerja JSKK 25-26 Januari 2010. Bedjo Untung merupakan korban Tragedi 1965 yang tertangkap dalam

⁶ Sandyawan Sumardi “*Jaringan Relawan Kemanusiaan: Meniti Buih Gelombang Tsunami*”

(<https://www.indonesiana.id/read/113948/jaringan-relawan-kemanusiaan-meniti-buih-gelombang-tsunami>), Diakses pada Tanggal 6 Juli 2022 Pukul 2:46 WIB.

⁷ Kompas.com, “*Hari Ini dalam Sejarah: Munir Dibunuh di Udara*” (<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/07/08170851/hari-ini-dalam-sejarah-munir-dibunuh-di-udara?page=all>), Diakses pada Tanggal 6 Juli 2022 Pukul 1:22 WIB.

⁸ Prima Gumilang, “*Kisah Mencekam Mugiyanto Korban Penculikan 1998 Dekati Maut*” (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160523111051-20-132726/kisah-mencekam-mugiyanto-korban-penculikan-1998-dekati-maut>), Diakses pada Tanggal 6 Juli 2022 Pukul 1:16 WIB.

Operasi Kalong pada tanggal 24 Oktober 1970, di depan Gedung Sarinah, Jakarta Pusat. Dengan demikian Presidium JSKK, ditempati oleh tiga orang yang terdiri dari: Sumarsih, Suciwati, dan Bedjo Untung.

JSKK merupakan sebuah paguyuban yang berdiri pada tanggal 9 Agustus 2005. Para anggota dalam paguyuban tersebut adalah para korban atau keluarga korban pelanggaran HAM yang telah tersentuh oleh proses peradilan maupun yang masih harus diperjuangkan menuju penyelesaian secara hukum. Anggota JSKK berasal dari masyarakat yang aktif di institusi-institusi bidang HAM maupun individu yang memiliki perhatian terhadap penegakan HAM di Indonesia.⁹

Sebelum lahirnya Aksi Kamisan, telah banyak aksi yang digagas namun tidak bertahan lama. Salah satu aksi damai yang dilakukan adalah aktivis perempuan pada tahun 1999 dan Konvoi Sepeda Motor untuk Munir pada tahun 2006. Aksi damai yang dilakukan oleh aktivis perempuan tersebut, berbeda dengan aksi yang dilakukan oleh Suara Ibu Peduli (SIP) yang dimulai sejak bulan November 1997 di Yayasan Jurnal Perempuan, hingga berpindah ke Bunderan Hotel Indonesia (HI) pada tanggal 23 Februari 1998, untuk tetap melakukan kegiatan *zero tolerance* atau berkampanye tentang anti kekerasan terhadap perempuan.

Aksi damai yang dilakukan oleh aktivis perempuan yang dimaksud, melainkan aksi damai aktivis perempuan yang dilakukan tiap Jumat sore di Bunderan Hotel Indonesia. Aksi tersebut merupakan bentuk respon perempuan yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan untuk mendukung penyelenggaraan

⁹ Usman Hamid, *et al.*, *Saatnya Korban Bersuara: Menata Derap Merajut Langkah*, (Jakarta: Yayasan Tifa, 2016), hlm. 199.

HAM di Indonesia pada era transisi orde baru menuju reformasi. Beberapa tokoh yang tergabung dalam aksi tiap Jumat sore tersebut adalah Sinta Nuriyah, Saparinah Sadli, dan Ita F Nadia, dan lainnya. Sedangkan beberapa tokoh dalam aksi perempuan yang dilakukan oleh Yayasan Jurnal Perempuan dalam SIP adalah Nur Iman Subono, Karlina Supeli, Gadis Arivia, Eun Sook, dan lainnya. Ide pelaksanaan aksi yang dilakukan SIP dapat ditelusuri berkat aksi para Ibu Plaza De Mayo, di Buenos Aires, Argentina.¹⁰

Motivasi Sumarsih (sebelum berada di JSKK) ketika mengikuti aksi tiap Jumat sore di Bundaran HI didasarkan atas keinginannya mencerap pengalaman menjadi massa aksi dan ingin merefleksikan pengalamannya ketika melakukan aksi massa. Dengan kata lain ketertarikan awal beliau ingin melakukan aksi massa ialah, karena ingin mengetahui bagaimana anaknya pada saat itu bisa ditembak atau seperti apa tentara dan polisi menjaga peserta aksi ketika aksi massa/demonstrasi berlangsung. Selain itu, Konvoi Sepeda Motor untuk Munir pada tahun 2006 merupakan sebuah aksi massa yang mendesak pemerintah untuk menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir. Para peserta aksi tersebut terdiri dari aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM)/Organisasi Non-Pemerintah (Ornop), seperti: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBHJ), dan IKOHI. Titik-titik aksi dimulai dari kantor KontraS di Jl. Borobudur, Menteng, dan berakhir di Bundaran HI. Pada beberapa titik tertentu, peserta aksi juga sering

¹⁰ Gadis Arivia, "Politik Representasi Suara Ibu Peduli" (<https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/politik-representasi-suara-ibu-peduli>), Diakses pada Tanggal 6 Juli 2022 Pukul 1:55 WIB.

membagikan selebaran mengenai penuntutan penuntasan kasus Munir dan menggelar aksi teatrikal.¹¹

Mengenai tempat muasalnya pembetulan kesepakatan Aksi Kamis, setidaknya terdiri dalam tiga versi: *Pertama*, versi mengenai rapat JSKK di dalam kantor KontraS di Jl. Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat. *Kedua*, mengenai rapat JSKK di halaman atau gazebo kantor KontraS di Jl. Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat. *Ketiga*, mengenai rapat atau pertemuan di Kantor JSKK di Jl. Bonang, Menteng, Jakarta Pusat. Ketiganya memiliki keterangan waktu yang tunggal mengenai keakuratannya, yaitu tahun 2006. Berdasarkan catatan harian Sumarsih (15 Maret, 2012), pada penghujung tahun 2006, JSKK mengadakan *sharing* bersama KontraS dan JRK untuk mencari alternatif kegiatan dalam perjuangannya. Terhitung pada pertemuan hari Selasa, 9 Januari 2007, JSKK bersama KontraS dan JRK, menyepakati untuk mengadakan suatu kegiatan guna bertahan dalam perjuangan mengungkap fakta kebenaran, mencari keadilan, dan melawan lupa yang melahirkan sebuah kegiatan berupa Aksi Diam. Dalam kesepakatan tersebut, Aksi Diam dilaksanakan sekali dalam seminggu, penentuan hari, lokasi, waktu, pakaian, warna, dan maskot sebagai simbol aksi.

Ide Aksi Diam yang disepakati secara kolektif memiliki beberapa alasan, misalnya terkait pemilihan hari yang jatuh pada hari Kamis. Hal ini merupakan sebuah ketidaksengajaan karena para keluarga korban merasa bahwa hari Kamis merupakan hari yang tepat bagi semua pihak yang terdiri dari ibu rumah tangga, pekerja, dan lain sebagainya. Pemilihan lokasi di depan Istana Presiden karena

¹¹ Detik News, “*Pendukung Munir Konvoi Ingatkan Pemerintah*” (<https://news.detik.com/berita/d-698561/pendukung-munir-konvoi-ingatkan-pemerintah>), Diakses pada Tanggal 6 Juli Pukul 2:04 WIB.

merupakan simbol pusat kekuasaan. Pemilihan waktu yang ditentukan pada jam 16:00–17:00 WIB berdasarkan pada rutinitas lalu lintas di depan Istana Presiden yang ramai oleh kendaraan orang pulang kerja. Pemilihan pakaian dan payung hitam sebagai maskot yang digunakan adalah hitam-hitam.¹²

Alhasil dari kesepakatan yang dilakukan, terciptalah Aksi Diam sebagai sebuah aksi damai yang dalam prosesnya hingga kini dikenal sebagai Aksi Kamisan, secara resmi dimulai pada tanggal 18 Januari 2007. Aksi ini didasari atas persamaan rasa bahwa negara telah sengaja abai dalam persoalan-persoalan kasus pelanggaran HAM masa lampau di Indonesia. Pemerintah dianggap tidak boleh terus mengelak, diam, apalagi melupakan peristiwa-peristiwa penting terkait HAM yang belum terungkap. Para peserta Aksi Kamisan, juga selalu melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia guna mengingatkan untuk mengusut pelanggaran HAM sampai tuntas.

Maka dari itu, setiap hari Kamis pukul 16:00–17:00 WIB, para Pegiat Aksi Kamisan berdiri di depan Istana Merdeka/Istana Presiden dengan mengenakan pakaian dan atribut serba hitam. Mereka menunjukkan protesnya dengan diam dan berdiri sebagai pilihan yang paling efektif dalam melakukan aksi tersebut. Diam menunjukkan diri sebagai bukan perusuh atau bukan aksi brutal, bukan warga negara yang susah diatur, juga bukan warga negara yang membuat bising telinga, tetapi tetap menuntut pemerintah untuk tidak diam. Berdiri melambangkan bahwa korban atau keluarga korban pelanggaran HAM adalah

¹² Nia Nadia, *op. cit.*, hlm. 36-37.

warga negara yang tetap mampu berdiri untuk menunjukkan kepada penguasa bahwa mereka mempunyai hak sebagai warga Indonesia.¹³

Perwujudan awal Aksi Kamisan sebagai aksi damai yang berbentuk demonstrasi/aksi diam, disertai payung hitam yang bertuliskan tuntutan-tuntutan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, menyebabkan efek domino yang menjadi sikap aktif dari para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM dalam menyuarkan kegelisahan, tuntutan, atau aspirasinya. Dalam kegelisahan skema gerakan sosial menurut W. E. Gettys, disebabkan oleh kehadiran pihak-pihak yang berkepentingan untuk vokal dalam menyuarkan aspirasinya. Terlebih lagi buruknya respon serta komunikasi antar instansi pemerintah yang minim dalam tindakan pengusutan pelanggaran HAM di Indonesia membuat napas perjuangan Aksi Kamisan semakin panjang.¹⁴

Aksi Kamisan disebut sebagai konspirasi kebisuan yang memainkan peranan penting di dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai tendensi untuk membisu ketika berbicara tentang masa lampau dan menjadikan kebisuan sebagai identitasnya. Selain berdiri dan berdiam diri mengenakan pakaian hitam-hitam dan payung hitam beserta beberapa spanduk/pamflet bertuliskan berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia, seperti Tragedi Semanggi I–II, Tragedi Trisakti, Tragedi Tanjung Priok, Tragedi Talang Sari, Tragedi 13–15 Mei 1998, dan tragedi lainnya maupun korban

¹³ Aksi Kamisan, “*Ini Penjelasan Sejarah Singkat Aksi Kamisan*” (<https://www.aksikamisan.net/tentang/>), Diakses pada tanggal 9 September 2021 Pukul 22:51 WIB.

¹⁴ Rendy Adiwilaga, “Aksi Kamisan Sebagai Representasi Civitil Society dan Respon Pemerintah Era Susilo Bambang Yudhoyono Menyikapi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Masa Lampau”, *Jurnal Madani Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, (Vol. 10, No. 3, 2018), hlm. 19.

pelanggaran HAM lainnya. Dalam Aksi Kamisan setidaknya mempunyai empat target sasaran, yaitu Presiden sebagai penerbit regulasi bernama Keputusan Presiden (Keppres), DPR sebagai instansi yang merumuskan surat-surat rekomendasi kepada Presiden, Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik, dan Kejaksaan Agung sebagai lembaga penyidik.¹⁵

Secara langsung atau tidak langsung, kemunculan Aksi Kamisan juga dapat dipengaruhi situasi pada masa terbukanya keran demokrasi di Indonesia yang berpihak pada nilai-nilai HAM, misalnya seperti era pemerintahan B. J. Habibie yang telah melakukan beberapa manuver untuk melakukan upaya menghormati, melindungi, dan memenuhi aspek HAM yang menjadi corak negara demokrasi. Hal ini tercermin pada UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia; UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang ratifikasi konvensi International Labour Organisation (ILO) mengenai penghapusan kerja paksa; UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang ratifikasi konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja; UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang ratifikasi konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan; UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang ratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial 1965.

Adapula UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia; UU Nomor 9 Tahun 1999 tentang penjaminan kebebasan berpendapat; UU Nomor 26 Tahun 1999 tentang pencabutan UU subversif; Keppres Nomor 181 Tahun 1998 yang menghasilkan Komisi Perlindungan Perempuan; Inpres Nomor 26 Tahun

¹⁵ Rendy Adiwilaga, *op. cit.*, hlm. 22.

1999 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi; Inpres Nomor 4 Tahun 1999 tentang melaksanakan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998; serta UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang kemerdekaan pers, yang melahirkan kembali kekuatan sosial politik di masyarakat.¹⁶

Selain itu, pada saat pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 2000, mengeluarkan produk kebijakan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang jadi pondasi, spirit, atau menjadi tujuan Aksi Kamisan untuk mengadili para pelaku pelanggar HAM. UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang kemerdekaan serikat buruh, yang membawa angin segar untuk masyarakat sipil dari berbagai elemen untuk kembali membangun serikat, organisasi, atau komunitas. Kemudian, Presiden Abdurrahman Wahid juga mengeluarkan Keppres Nomor 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Inpres Nomor 14 Tahun 1967 yang bernuansa diskriminatif terhadap masyarakat Tionghoa. Serta membuka cakrawala masyarakat agar lebih toleran terhadap ajaran atau paham politik manapun dengan mengusulkan pencabutan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pelarangan penyebaran ajaran Marxisme, Komunisme, dan Leninisme.¹⁷

Memasuki era produk kebijakan di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada masa ini SBY melakukan pengesahan atau ratifikasi

¹⁶ Museum Kepresidenan “Kebebasan Pers, Reformasi Hukum, dan Hak Asasi Manusia di Masa B.J. Habibie”

(<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/kebebasan-pers-reformasi-hukum-dan-hak-asasi-manusia-di-masa-bj-habibie/>), Diakses pada tanggal 24 Desember 2021 Pukul 00:29 WIB.

¹⁷ Maswan dan Aida Farichatul Laila, *Gus Dur, Manusia Multidimensional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 123-124.

kovenensi internasional hak-hak sipil dan politik beserta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang masing-masing termaktub dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 dan UU Nomor 11 Tahun 2005, UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang ratifikasi kovenensi internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan seluruh anggota keluarganya, serta Keppres Nomor 12 Tahun 2014 tentang pergantian istilah China menjadi Tionghoa atau Tiongkok.¹⁸ Sedangkan, pada awal percaturan politik Joko Widodo (Jokowi) untuk melanggeng ke Istana memiliki janji atau komitmen penuntasan pelanggaran HAM yang tersemat dalam Nawa Cita (sembilan agenda prioritas program pemerintahan). Sehingga berbagai produk kebijakan pemerintah Indonesia pasca Orde Baru ini, tentunya juga menjadi landasan atau faktor-faktor secara langsung maupun tidak langsung dalam mempengaruhi keberadaan Aksi Kamisan sejak awal kemunculannya.

Beragam komunitas yang bergerak dalam bidang HAM maupun individu lainnya yang menjadi peserta Aksi Kamisan, seiring berjalannya waktu semakin berkembang luas dan masif. Aksi Kamisan menjadi suatu bentuk gerakan sosial baru berbasis HAM di Indonesia yang mempunyai penantian maupun perjalanan panjang untuk menuntut keadilan dalam menuntaskan pelanggaran HAM. Aksi Kamisan seiring berjalannya waktu maupun perkembangan zaman, juga mengalami transformasi dalam gerakannya yang lebih variatif.

Variasi dari Aksi Kamisan, mulai tampak ketika memasukan unsur kegiatan orasi atau refleksi secara bebas oleh para peserta aksi. Hal ini menjadi transformasi awal Aksi Kamisan yang tadinya dikenal sebagai aksi diam, mulai

¹⁸ Fitri Supratiwi (ed) “Keppres Penggantian Istilah China Menjadi Tionghoa ditandatangani” (<https://www.antaraneews.com/berita/425081/keppres-penggantian-istilah-china-menjadi-tionghoa-ditandatangani>), Diakses pada tanggal 24 Desember 2021 Pukul 01:25 WIB.

bersuara secara verbal dan menunjukkan gestur. Peserta aksi yang ingin melakukan refleksi tidak dibatasi, siapapun boleh bersuara untuk menuntut atau memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan HAM. Peserta aksi yang melakukan refleksi tersebut beberapa di antaranya adalah para pakar atau ahli, peneliti, korban, keluarga korban, tokoh publik, aktivis, musisi, komedian, dan lainnya. Selain itu, kegiatan Aksi Kamisan bertransformasi lebih variatif lagi dengan membuat “Festival Rakyat” yang menampilkan pertunjukan pameran foto dan kesenian seperti, pembacaan puisi, teatrikal, hingga musik. Adapula program kegiatan diskusi yang dilakukan secara rutin setiap dua minggu sekali dalam sebulan yang dinamai Ngaso Malam Kamis yang bertempat di Kios Ojo Keos, di Bona Indah Plaza Blok A2 No. B11, Jl. Karang Tengah Raya, Jakarta Selatan.¹⁹ Semenjak Covid-19 melanda Indonesia, Aksi Kamisan mengubah kegiatannya menjadi kampanye di media sosial dan melakukan diskusi publik secara daring.

Dari berbagai dinamika yang terjadi di Aksi Kamisan Jakarta, peneliti menganggap bahwa tema ini menarik untuk dikaji lebih dalam dan perlu dikembangkan menjadi sebuah karya tulis ilmiah guna menambah kajian dalam spektrum sejarah, khususnya bidang gerakan sosial di Indonesia. Peneliti akan membatasi penelitiannya pada periode tahun 2007 sampai tahun 2021, untuk memotret dan mengupas segala kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Aksi Kamisan Jakarta.

¹⁹ Ngaso Malam Kamis merupakan Forum rutin yang diadakan kelompok muda Aksi Kamisan dalam rangka mengembangkan wacana HAM, pendidikan publik, hingga dukungan terhadap penuntasan pelanggaran HAM. Kios Ojo Keos adalah tempat belanja dan ritel serta ruang bersama yang independen untuk musik, buku, kopi, *merchandise*, dan *cookies* yang dikelola oleh keluarga Band Efek Rumah Kaca.

(<https://www.instagram.com/aksikamisan/>) Diakses pada tanggal 29 Desember 2021 Pukul 17:18 WIB.

(<https://www.instagram.com/kiosojokeos/>) Diakses pada tanggal 29 Desember 2021 Pukul 17:19 WIB.

Dengan adanya kajian tersebut, penulis berharap bahwa masyarakat secara luas dapat menyadari eksistensi Aksi Kamisan Jakarta dan menjalankan semangat maupun kesetiaan kepada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Sehingga masyarakat luas mampu berperan secara kolektif maupun individu demi mewujudkan suatu perubahan ke arah Indonesia yang ramah HAM dan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan temporal dari penelitian ini adalah tahun 2007–2021. Tahun 2007 digunakan karena pada tahun itu gerakan Aksi Kamisan resmi dimulai oleh JSKK. Kemudian tahun 2021 diambil sebagai batasan akhir, karena pada tahun ini gerakan Aksi Kamisan sudah mentransformasi gerakannya yang sebelumnya berada di seberang Istana Merdeka/Istana Presiden, Jakarta, beralih menjadi virtual di media sosial, seperti Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, dan Zoom.

Batasan spasial dari tulisan ini adalah di wilayah Provinsi DKI Jakarta, karena Aksi Kamisan lahir dan mengawali tumbuhnya di Provinsi DKI Jakarta. Aliansi, sekutu, atau afiliasi lembaga lainnya yang ikut tergabung dalam gerakan Aksi Kamisan juga berawal di wilayah ini. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus kepada wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya di sekitar Istana Merdeka/Istana Presiden, Kwitang, dan Cikini.

Berangkat dari pemaparan di atas tentang latar belakang Aksi Kamisan, tentunya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan dengan pihak inisiator gerakan Aksi Kamisan maupun peserta

Aksi Kamisan, tentang bagaimana gerakan Aksi Kamisan itu terbentuk serta berkembang dan masih bisa eksis, meskipun sudah lebih dari satu dasawarsa, terlebih rezim pemerintahan di Indonesia sebagai aktor kunci penuntasan kasus pelanggaran HAM silih berganti. Guna lebih fokusnya permasalahan yang akan dikaji, maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang munculnya Aksi Kamisan?
2. Bagaimana jaringan Aksi Kamisan dan kebijakan pemerintah terkait hak asasi manusia?
3. Bagaimana aktivitas Aksi Kamisan dan pengaruhnya terhadap masyarakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian ini di antaranya, yaitu:

1. Mengkaji faktor-faktor yang menjadi penyebab berdirinya Aksi Kamisan sebagai gerakan sosial baru.
2. Membahas dan menganalisis jaringan Aksi Kamisan dan kebijakan pemerintah terkait HAM.
3. Membahas dan menganalisis aktivitas Aksi Kamisan dan pengaruhnya terhadap kalangan masyarakat.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sejarah berdirinya Aksi Kamisan sampai daya tahan eksistensi Aksi Kamisan, mengetahui jaringan Aksi Kamisan dan kebijakan pemerintah yang silih berganti, hingga segala aktivitas Aksi Kamisan yang juga mempengaruhi kalangan masyarakat secara kualitatif. Selain itu, juga untuk memperkaya kajian sejarah

sosial, serta diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pembaca dan para peneliti sejarah sosial tentang Sejarah Aksi Kamisan maupun tentang dunia pergerakan sosial di Indonesia, khususnya di Kota Jakarta secara lebih terperinci.

Secara praktis dari penelitian ini diharapkan untuk solusi masalah kekinian terkait keberagaman persoalan kemanusiaan, ketidakadilan, stagnasi maupun regresi demokrasi di Indonesia. Aksi Kamisan sebagai bentuk gerakan sosial baru bisa menjadi suatu rujukan solusi dari masalah kekinian yang dilakukan dengan cara melakukan perlawanan terhadap negara dengan cara nir-kekerasan. Selain itu, Aksi Kamisan juga mampu merebut sekaligus mempertahankan suatu ruang publik di seberang Istana Merdeka/Istana Presiden, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, tepatnya di Taman Aspirasi/Jl. Silang Monas Barat Laut, setiap hari kamis sore untuk melakukan aksi langsung yang damai. Konsistensi Aksi Kamisan dalam perlawanannya terhadap negara atau pemerintah Indonesia juga bisa menjadi spirit, sekaligus refleksi perlawanan untuk Indonesia menjadi lebih humanis, adil, dan demokratis.

Dalam proses berlangsungnya Aksi Kamisan sebagai gerakan sosial baru di Jakarta dari tahun 2007—2021, juga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Walaupun sejauh ini implementasi yang berkeadilan melalui mekanisme yudisial belum pernah terlaksana secara komprehensif. Aksi Kamisan mampu mendapat dukungan publik yang sangat luas, baik di dalam negeri maupun internasional untuk melakukan aksi solidaritas dalam arus perlawanan dan tuntutan kepada pemerintah agar segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Sumber-sumber yang menjadi acuan penulis yaitu berupa buku-buku, jurnal, maupun tulisan yang sudah ada mengenai teori dan juga tentang aspek sosial, politik, dan budaya dalam gerakan sosial yang bersifat umum, beberapa di antaranya: Tulisan Rajendra Singh yang diterjemahkan oleh Eko P. Darmawan dalam buku “Gerakan Sosial Baru (2010)”, membahas tentang dasar-dasar teori gerakan sosial baru serta beragam teori gerakan sosial. Buku ini menjadi penting untuk membantu peneliti dalam membedah dan menentukan indikator terhadap Aksi Kamisan sebagai kerangka gerakan sosial baru.²⁰

Tulisan Peter Burke yang diterjemahkan oleh Mestika Zed, *et al.*, “Sejarah dan Teori Ilmu Sosial (Ed. II)” (2015), membahas tentang keterkaitan atau peminjaman ilmu-ilmu sosial dalam penelitian dan penulisan sejarah. Tentunya buku tersebut menjadi landasan atau dasar pendekatan penelitian kali ini yang cenderung banyak meminjam teori ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi untuk menemukan dan membahas Aksi Kamisan sebagai gerakan sosial baru dalam bentuk penulisan sejarah.²¹

Tulisan Zayiardam Zubir “Sejarah Gerakan Sosial (2015)”, membahas tentang keberagaman konflik dalam gerakan sosial di Indonesia. Buku ini membantu peneliti untuk memahami cakrawala pemikiran mengenai kemunculan gerakan sosial dan melihat Aksi Kamisan sebagai akibat konflik yang memiliki

²⁰ Rajendra Singh, *Gerakan Sosial Baru*, (Yogyakarta: Resist Book, 2010).

²¹ Peter Burke, *Sejarah dan Teori Ilmu Sosial (Ed. II)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015).

kompleksitas maupun keberagaman lintas isu/kasus dalam koridor pelanggaran HAM berat di Indonesia.²²

Serta tak lupa pula tulisan Sartono Kartodirjo “Pemberontakan Petani Banten 1888 (2015)” yang membahas jalannya proses kemunculan hingga perkembangan pemberontakan petani di Banten, sebagai salah satu contoh konkrit gerakan sosial/klasik di Indonesia. Buku ini berkaitan dengan perbandingan perspektif antara corak gerakan sosial/tradisional dengan penelitian yang dilakukan kali ini, yaitu Aksi Kamisan sebagai gerakan sosial baru.²³

Kemudian adapula jurnal yang ditulis Yongky Gigih Prasisko, “Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia (2016)”. Prasisko membahas tentang kelahiran, corak, atau ciri gerakan sosial baru di Indonesia, jurnal ini membantu menjelaskan kelahiran gerakan sosial baru di Indonesia beserta para aktornya yang lahir dari kelas menengah (baru).²⁴

Selain itu, jurnal dari Rendy Adiwilaga, “Aksi Kamisan Sebagai Representasi *Civil Society* dan Respon Pemerintah Era Susilo Bambang Yudhoyono Menyikapi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Masa Lampau (2018)” yang membahas tentang tuntutan Aksi Kamisan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.²⁵ Jurnal yang ditulis Leonardo Julius Putra “Aksi Kamisan: Sebuah Tinjauan Praktis dan Teoritis Atas Transformasi Gerakan

²² Zaiyardam Zubir, *Sejarah Gerakan Sosial*, (Padang: Minangkabau Press, 2015).

²³ Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, (Depok: Komunitas Bambu, 2015).

²⁴ Yongky Gigih Prasisko, “Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi UGM*, (Vol. 3, No. 2, 2016).

²⁵ Rendy Adiwilaga, “Aksi Kamisan Sebagai Representasi *Civil Society* dan Respon Pemerintah Era Susilo Bambang Yudhoyono Menyikapi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Masa Lampau”, *Jurnal Madani Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, (Vol. 10, No. 3, 2018).

Simbolik (2016)” membahas tentang simbolisme dalam gerakan Aksi Kamisan, sekaligus membantu penelitian yang ditulis dalam melihat unsur-unsur gerakan sosial baru dalam bentuk simbol-simbol di Aksi Kamisan.²⁶

Tulisan skripsi yang dijadikan rujukan adalah dari Nia Nadia yang berjudul “Mobilisasi Sumberdaya dalam Aksi Kamisan (2019)”. Skripsi ini membahas tentang arus pergerakan sumberdaya atau aktivitas dalam gerakan Aksi Kamisan.²⁷ Skripsi Nilla Nurvian Sari yang berjudul “Konstruksi Identitas Kolektif Pada Gerakan Aksi Kamisan (2020)” yang membahas tentang identitas sebagai eksistensi Aksi Kamisan, tentunya skripsi tersebut membantu menjelaskan *the identity-oriented theory* atau teori orientasi identitas dalam studi maupun perspektif gerakan sosial baru dalam Aksi Kamisan.²⁸

E. Kerangka Analisis

Penelitian ini merupakan studi sejarah sosial. Sejarah sosial adalah setiap gejala sejarah yang memanasifestasikan kehidupan sosial suatu komunitas atau kelompok. Sejarah sosial mencakup seluruh aspek masyarakat, salah satunya adalah bentuk proses interaksi seperti hubungan timbal balik antar manusia sebagai pelaku sejarah yang telah terjadi dalam konteks sosio-kultural pada masa lampau.²⁹

²⁶ Leonardo Julius Putra, “Aksi Kamisan: Sebuah Tinjauan Praktis dan Teoritis Atas Transformasi Gerakan Simbolik”, *Jurnal Polinter Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UTA'45 Jakarta*, (Vol. 2, No. 1, 2016).

²⁷ Nia Nadia, “Mobilisasi Sumberdaya dalam Aksi Kamisan”, *Skripsi*, (Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

²⁸ Nilla Nurvian Sari, “Konstruksi Identitas Kolektif Pada Gerakan Aksi Kamisan”, *Skripsi*, (Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

²⁹ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dan Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1999), hlm. 50.

Aksi Kamisan sebagai objek penelitian, merupakan wadah gerakan sosial baru untuk berjuang mencapai suatu perubahan khususnya yang berkaitan dengan kemanusiaan, keadilan dan demokrasi. Gerakan sosial merupakan reaksi yang muncul atas sekumpulan individu maupun kelompok yang tidak puas terhadap kondisi kehidupan sosial yang terjadi. Dengan kata lain ada semacam ketamakan hidup yang bisa menyebabkan perpecahan sosial dan mental yang terjadi di kalangan masyarakat, sehingga gerakan sosial ini berkembang dengan tujuan untuk menciptakan suatu perubahan atau keharmonisan.³⁰

Konsep gerakan sosial baru memfokuskan pada kaitan isu-isu simbolik dan kebudayaan dengan identitas. Gerakan sosial baru juga erat kaitannya dengan pluralisme ide serta kecenderungan untuk mengembangkan pandangan pragmatis dalam upaya menciptakan sistem partisipasi politik seluas-luasnya dalam proses pengambilan keputusan. Keanggotaan gerakan sosial baru bersifat terbuka tanpa menghiraukan latar belakang kelas sosial, etnisitas, politik, maupun agama. Dengan kata lain gerakan sosial baru dapat dikategorikan sebagai suatu perkumpulan yang inklusif dan diprakarsai oleh aktor-aktor yang diikuti oleh kelompok-kelompok yang memiliki kesadaran memobilisasi diri secara bersama-sama untuk memperjuangkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.³¹

Dalam studi gerakan sosial, ada klasifikasi dari berbagai tradisi teoretis. Secara umum, klasifikasi tersebut adalah: gerakan sosial/klasik, gerakan sosial neo-klasik, dan gerakan sosial baru/kontemporer. Dalam tradisi gerakan

³⁰ Luthfi J, Hesti, dan Rima, *Negara, Civil Society, dan Demokratisasi: Pergerakan Membangun Solidaritas Sosial dalam Merebut Perubahan*, (Malang: InTranspub, 2012), hlm. 115.

³¹ Dewi Kartika dan Royke R, "Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual Pada Kasus Satinah", *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana*, (Vol. 12, No. 1, 2015), hlm. 109–110.

sosial/klasik, meliputi sebagian besar studi dalam perilaku kolektif seperti *crowd* (kerumunan), *riot* (kerusuhan), dan *rebel* (pemberontakan, penolakan, atau pembangkangan), yang berangkat dari perspektif psikolog-sosial Eropa dan para sejarawan dari sebelum tahun 1950-an.³²

Kerumunan diklasifikasikan oleh Gustave Le Bon sebagai kerumunan heterogen dan kerumunan homogen. Kerumunan heterogen terbagi menjadi kerumunan non-identitas dan identitas. Kerumunan non-identitas misalnya dicontohkan pada kerumunan di jalan seperti orang yang menonton kecelakaan. Sebaliknya, kerumunan identitas dicontohkan seperti anggota parlemen. Sedangkan kerumunan homogen seperti sekte, kasta, dan kelas. Faktor dasar terjadinya kerumunan, karena ada faktor dasar yang diyakini, seperti: ras, tradisi, waktu, institusi politik dan sosial, hingga institusi dan pendidikan.³³ Ketika kerumunan sudah muncul, maka ada semacam pengaruh atau masukan ide-ide tertentu di antara banyak orang, yang disebut sebagai faktor langsung. Faktor langsung tersebut yang memunculkan kerusuhan, juga sebagai resolusi kolektif (kerumunan), yang biasanya terjadi cenderung spontan.³⁴

Dalam tradisi gerakan sosial neo-klasik masih tergabung dalam gerakan sosial/klasik, yang kebanyakan publikasi mengenai tulisannya setelah tahun 1950-an. Dalam tradisi gerakan sosial neo-klasik, dibagi dalam dua model gerakan sosial/klasik, yaitu fungsionalis dan dialektika marxis. Dalam kerangka fungsionalis, masyarakat dianggap sebagai sebuah keseluruhan yang terorganisir,

³² Rajendra Singh, *Gerakan Sosial Baru* (Terj.), (Yogyakarta: Resist Book, 2010), hlm. 111-121.

³³ Gustave Le Bon, *The Crowd: A Study of the Popular Mind*, (New York: Dover Publications, 2002), hlm. 100-101.

³⁴ *Ibid*, hlm. 43-44.

yang tersusun dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Keseluruhan tersebut eksis karena konsensus nilai yang memiliki kemampuan untuk mengatasi problem penyimpangan, konflik, dan protes, dengan cara memunculkan respon-respon penyesuaian/penyelarasan. Sedangkan dalam kerangka dialektika Marxis, bisa dilihat dari ada atau tidak adanya dialektika atau metode penalaran yang dialektis dalam fungsionalisme. Dengan kata lain, dalam kerangka dialektis Marxis mengenai teoritis atas masyarakat dan sejarah, ialah adanya sekelompok gagasan mengenai ide konsep kelas yang bersifat materialistik dan dialektika sebagai sebuah filsafat sekaligus sebagai metodologi.³⁵

Memasuki tradisi gerakan sosial baru, mulai timbul pada periode tahun 1960-an dan 1970-an di Amerika dan Eropa, yang melahirkan gerakan berskala luas di seputar isu yang berwatak humanis, kultural, dan non-materialistik. Tujuan dan nilai-nilai gerakan sosial baru bersifat universal. Aksi-aksi dalam gerakan sosial baru diarahkan untuk membela esensi hingga melindungi kondisi kemanusiaan demi masa depan dan kehidupan yang lebih baik. Gerakan sosial baru tidak terikat pada wacana ideologis yang menyuarakan anti-kapitalisme, revolusi kelas, dan perjuangan kelas. Gerakan sosial baru adalah plural, ada beberapa isu yang dipertegas dalam gerakan sosial baru misalnya seperti, kebebasan sipil, anti-rasisme, lingkungan hidup, feminisme, dan perdamaian.³⁶

Keberangkatan tradisi gerakan sosial baru di Amerika dan Eropa, memiliki teori dominan yang berbeda. Jika di Amerika ada teori yang dikenal sebagai *The Resource Mobilization Theory* (RMT) atau teori mobilisasi sumberdaya dan di

³⁵ Rajendra Singh, *op.cit*, hlm. 207-232.

³⁶ *Ibid*, hlm. 121-122.

Eropa ada *The Identity-Oriented Theory* (IOT) atau teori berorientasi identitas. RMT memandang bahwa dinamika terjadinya gerakan sosial cenderung melibatkan dimensi-dimensi rasionalitas. Sedangkan IOT memandang bahwa dinamika terjadinya gerakan sosial cenderung melibatkan dimensi-dimensi emosionalitas. Dalam teori RMT, selain memfokuskan perhatiannya kepada proses-proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya suatu gerakan, RMT juga lebih banyak memberikan perhatian terhadap faktor-faktor ekonomi, politik, hingga sifat-sifat psikologis dari anggota gerakan. Teori ini berasumsi bahwa dalam suatu masyarakat yang memiliki rasa ketidakpuasan maka dimungkinkan untuk memunculkan suatu gerakan sosial dan faktor organisasi dan kepemimpinan merupakan faktor yang dapat mendorong atau menghambat suatu gerakan sosial.³⁷

Di sisi lain, teori IOT merupakan semacam anti-tesis RMT yang memfokuskan dan terikat secara signifikan dengan rasionalisme dan materialisme atau dengan kata lain IOT sebagai teori yang melampaui teori RMT yang gagal menjelaskan beberapa ekspresi dalam gerakan sosial baru, seperti gerakan feminisme, gerakan lingkungan, dan gerakan kemanusiaan. Sifat-sifat dalam IOT adalah non-materialistik dan ekspresif. Keberadaan teori ini juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai integritas dan solidaritas dalam gerakan sosial dan menolak usaha dari RMT untuk memaksakan model rasionalitas dari neo-utilitarian dan voluntaristik dalam menjelaskan gerakan sosial.³⁸

³⁷ Oman Sukmana, "Konvergensi antara Resource Mobilization Theory dan Identity Oriented Theory Dalam Studi Gerakan Sosial Baru", *Jurnal Sosiologi Reflektif*, (Vol. 8, No. 1, 2013), hlm. 40.

³⁸ Oman Sukmana, *op. cit.*, hlm. 59.

Teori IOT juga akrab dengan beberapa elemen teori Marxis, seperti tentang perjuangan, kesadaran, mobilisasi, dan solidaritas. Namun, sekaligus juga menolak tesis reduksionisme dan deterministik materialisme maupun konsep-konsep basis materialistik tentang formasi sosial. Karena nilai-nilai yang diperjuangkan dalam gerakan sosial baru mengusung nilai-nilai kemanusiaan secara luas. Pada akhirnya teori IOT berfokus untuk menjawab konsep secara sistematis mengenai identitas kolektif sebagai yang memiliki kepentingan, nilai, perasaan, dan tujuan bersama dan di dalamnya meliputi solidaritas yang berangkat dari komitmen individu, serta menyoroti struktur makro sosial dan dinamika yang membantu membentuk dan memberikan ketertarikan, konteks politik, simbol kultur, dan sebagainya (mengeksplorasi tentang hubungan individu dan kolektivitasnya dengan fokus utama pada kolektivitas), hingga meliputi komitmen yang memfokuskan perhatian pada investasi individu dalam garis aksi individu yang konsisten dengan garis aksi yang dimunculkan oleh kolektivitas (menjelaskan hubungan individu dan kolektivitasnya melalui perhatian utama kepada aktivitas individu).³⁹

Walaupun teori RMT dan IOT memiliki perbedaan yang cukup tajam namun kedua teori tersebut bisa diintegrasikan dalam menjelaskan fenomena gerakan sosial baru dengan perspektif konvergensi. Konvergensi merupakan penggabungan perspektif antara teori RMT dan IOT. Perspektif RMT yang cenderung dalam dimensi rasionalitas yang melibatkan faktor-faktor seperti; organisasi, pemimpin, mobilisasi sumber daya, jaringan, peluang, maupun kapasitas, digabungkan dengan perspektif IOT yang cenderung dalam dimensi

³⁹ *Ibid*, hlm. 42-51.

emotif seperti; identitas kolektif, solidaritas, dan komitmen. Sehingga analisis dinamika gerakan sosial baru dalam perspektif konvergensi melingkupi dimensi rasional dan emotif beserta faktor-faktornya. Pada kerangka perspektif model konvergensi inilah yang akan menjadi kecenderungan peneliti dalam mengamati dan menjelaskan dinamika Aksi Kamisan sebagai gerakan sosial baru.⁴⁰

Perihal aktor-aktor dalam gerakan sosial baru juga memiliki identitas yang pada garis besarnya berasal dari basis sosial yang luas, tidak terbagi-bagi, dan bahkan melintasi kategori-kategori sosial seperti, gender, pendidikan, atau kelas. Para aktor tidak terkotak-kotakkan pada pembagian tertentu seperti kasta, kelas, suku, agama, maupun teritori politik. Aktor-aktor yang ada di dalam gerakan sosial baru, beroperasi bukan karena kepentingan kelas mereka, tetapi mereka berjuang demi kepentingan kemanusiaan. Selain itu, para aktor gerakan sosial baru juga kerap melakukan penolakan pada basis identifikasi diri yang mapan, seperti dalam spektrum politik kanan atau kiri, liberal atau konservatif, dan tidak juga berdasarkan suku, umur, lokalitas. Namun biasanya aktor-aktor dalam gerakan sosial baru berasal dari “kelas menengah baru”, seperti orang-orang yang biasa bekerja dalam profesi pelayanan kemanusiaan, pelajar, ibu rumah tangga, dan pensiunan.⁴¹

Dalam sejarah gerakan sosial, gerakan tanpa kekerasan menjadi corak tersendiri dalam spektrum sejarah gerakan sosial. Sejarah gerakan sosial yang tidak melulu perihal kekerasan, justru memiliki nilai-nilai kearifan yang dapat ditemukan. Hal ini juga menjadi suatu peluang evaluasi bagi pemerintah atas

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 59-61.

⁴¹ Claus Offe, “New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics” *Journal Social Research Johns Hopkins University*, (Vol. 52, No. 4, 1985), hlm. 833-834.

kegagalannya dalam meredam konflik untuk mencari jalan keluar yang lebih berbudaya dan manusiawi demi mewujudkan suatu perubahan atau keharmonisan.⁴²

Pelanggaran HAM yang menjadi fokus dalam Aksi Kamisan terbagi menjadi dua. Hal ini berdasarkan klasifikasinya, yaitu pelanggaran HAM berat (*gross violation of human rights*) dan pelanggaran HAM (*human rights violation*). Keduanya sama-sama menjadi hal yang sangat penting diprioritaskan dan bukan berarti pelanggaran HAM memiliki derajat di bawah pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat setidaknya meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan yang meluas dan sistematis yang ditujukan kepada masyarakat sipil dengan cara tidak manusiawi dan menyebabkan penderitaan fisik dan mental. Selain itu, genosida, kejahatan perang, dan agresi juga termasuk dalam pelanggaran HAM berat.⁴³ Sedangkan pelanggaran HAM merupakan penderitaan, kesengsaraan, dan kesengajaan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif baik dalam spektrum hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan secara vertikal maupun horizontal.⁴⁴

Dasar pemilihan daerah atau lokasi merupakan sesuatu yang paling vital dalam menulis penelitian peristiwa sejarah dan menjadi hal yang krusial. Pengertian lokalitas sendiri artinya adalah batasan pemilihan daerah yang berkaitan dengan letak geografis sudut pandang administratifnya. Dengan kata lain lokalitas sejarah merupakan suatu tempat yang batasannya ditentukan oleh

⁴² Zaiyardam Zubir, *Sejarah Gerakan Sosial*, (Padang: Minangkabau Press, 2015), hlm. 10.

⁴³ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 7-9 dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Pasal 5.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

penulis sejarah. Hal tersebut juga otomatis berlaku pada pemilihan waktu. Pemilihan waktu ini ditentukan oleh momen atau episode di dalam suatu periode peristiwa yang terjadi dan menarik perhatian pada saat tersebut.⁴⁵

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan multidisipliner, yakni pembahasan sejarah dibantu oleh ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, politik, dan psikologi. Hal ini dikarenakan cakupan sejarah sosial sangat luas dan juga mendetail sehingga ruang lingkungannya bisa mencakup kehidupan sehari-hari penghuni sebuah kawasan di masa lampau, hubungan sosial antara individu dengan kelompok sosial dan kelompok sosial lainnya.

F. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahapan atau kegiatan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.⁴⁶ Tahapan atau kegiatan heuristik adalah upaya untuk menemukan dan mengumpulkan atau g

Guna melengkapi data pada penelitian, juga dilakukan wawancara dan pencarian sumber penunjang lain berupa literatur. Pencarian data primer berupa wawancara dilakukan dengan para inisiator Aksi Kamisan dan juga para pegiat Aksi Kamisan yang minimal telah mengikuti aksi baik di lapangan (luring) atau virtual (daring) sebanyak lima kali, beserta pihak-pihak terkait seperti pengacara publik, pengabdian bantuan hukum, maupun jaringan atau pendukung jaringan Aksi Kamisan sebagai pendamping aksi.

⁴⁵ Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985), hlm. 15.

⁴⁶ Nina Herlina, *Metode Sejarah*, (Bandung: Satya Historika, 2020), hlm. 29-30.

Wawancara telah berlangsung bersama Aghniadi (28 Tahun) sebagai Mantan Anggota Divisi Kampanye Amnesty International Indonesia 2017-2020, Ahmad Sajali (27 Tahun) Anggota Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Aldy Prasetyo (23 Tahun) Demisioner Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul 2020, Alghiffari Aqsa (36 Tahun) Mantan Direktur LBH Jakarta 2015-2018, Andrie Yunus (25 Tahun) Mantan Asisten Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta 2021, Anes (34 Tahun) Fotografer Freelance Monumen Nasional, Apoy (40 Tahun) Anggota Unit Pengelola Kawasan Petugas Kebersihan Monumen Nasional, Aziz Rahmad Ahmadi (22 Tahun) Pegiat Aksi Kamisan Semarang, Bedjo Untung (74 Tahun) Korban Tragedi 1965-1966, Faizal Nur Rahman (25 Tahun) Pegiat Aksi Kamisan Jakarta, Lexy Rambadeta (46 Tahun) Dokumentarian HAM Independen, Marguerite Afra Sapiie (29 Tahun) Anggota Divisi Kampanye Amnesty International Indonesia, Maria Katarina Sumarsih (70 Tahun) Keluarga Korban Tragedi Semanggi I, Melvin Levina (19 Tahun) Pegiat Aksi Kamisan Bandung, Muhammad Fawwaz Nuruddin (22 Tahun) Ketua Serikat Mahasiswa Progresif Universitas Indonesia, Niccolo Attar (34 Tahun) Mantan Anggota Divisi Kampanye dan Jaringan YLBHI 2019-2022, Nico Wauran (29 Tahun) Pengacara Publik LBH Semarang, Sigit Purnama Hasyim (23 Tahun) Pegiat Aksi Kamisan Jakarta, Wanggi Hoediyatno (34 Tahun) Inisiator Aksi Kamisan Bandung, dan Yanti Andriyani (42 Tahun) Mantan Koordinator KontraS 2017-2020. Selanjutnya pencarian data sekunder berupa buku, jurnal, dan skripsi dilakukan di Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan secara daring.

Pemilihan informan dilakukan dengan metode *snowball sampling*. Metode ini adalah teknik pengumpulan data yang dimulai dari seseorang atau sekelompok orang ataupun kasus yang kemudian dikembangkan berdasarkan jaringan hubungan antar orang perorangan tersebut. Melalui *snowball sampling*, masyarakat digambarkan sebagai jaringan yang berhubungan antara satu orang dengan orang lainnya secara langsung atau tidak langsung oleh sebuah jaringan sekampung, senasib, atau saling berkenalan.⁴⁷

Tahap kritik sumber yaitu melakukan kritik terhadap semua sumber atau bahan yang telah didapat baik tertulis maupun lisan. Tahapan ini dilakukan untuk menguji keabsahan sumber melalui kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal dilakukan dengan cara melihat tampilan luar dari sumber yang kita dapat, seperti jenis kertas, tinta, dan lainnya yang dapat dilihat atau dirasakan dengan panca indera. Kritik internal dilakukan dengan membuktikan keaslian sumber tersebut. Tujuan dari kegiatan ini untuk menyeleksi data atau sumber yang telah dikumpulkan agar relevan dengan permasalahan atau tidak.⁴⁸

Tahap atau kegiatan interpretasi yaitu menafsirkan sumber, data, fakta-fakta, atau temuan yang didapat dalam penelitian untuk memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa. Penafsiran harus bersifat logis yang disusun dan dihubungkan menjadi satu kesatuan. Proses interpretasi harus bersifat selektif, karena tidak semua sumber dan temuan dapat dimasukkan ke dalam penelitian, sehingga harus dipilih yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti.

⁴⁷ Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan", *Jurnal ComTech Universitas Binus*, (Vol. 5, No. 2, 2014), hlm. 1113

⁴⁸ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), hlm. 32.

Penulisan sejarah atau historiografi adalah tahapan terakhir dari penelitian sejarah untuk dilakukan dalam penulisan. Penelitian ini diwujudkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **Sejarah Aksi Kamisan Jakarta: Gerakan Sosial Baru Tahun 2007–2021**.

G. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Bab I yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah untuk mengantarkan pembaca kepada topik permasalahan yang akan dibahas dan mengapa pembahasan ini menarik untuk dibahas, rumusan dan batasan masalah yang akan memfokuskan masalah ke dalam batasan spasial dan juga temporal dalam pembahasan nantinya.

Ada pula tujuan dan manfaat penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dari pembahasan mengenai tema ini dibuat, tinjauan pustaka yang menjabarkan bahwasanya penulisan ini didasari menggunakan literatur yang relevan guna membuktikan keorisinilan tulisan ini, kerangka analisis untuk menjelaskan penggunaan konsep dan teori yang digunakan dalam penulisan ini, metode penelitian dan bahan sumber yang menjelaskan bagaimana metode yang digunakan dalam penelitian tema sejarah sosial ini, serta sistematika penulisan yang menjelaskan isi masing-masing pembahasan di dalam bab.

Bab II menjelaskan tentang latar belakang munculnya Aksi Kamisan secara umum lalu ke khusus untuk menjelaskan pula faktor-faktor yang mendukung latar belakang munculnya gerakan sosial Aksi Kamisan secara terperinci dan sistematis.

Bab III membahas tentang hubungan aksi kamisan Jakarta dengan Aksi Kamisan di daerah, serta jaringan solidaritas HAM yang terdiri dari individu dan individu yang terikat oleh *non-government organisation* atau organisasi non-pemerintah maupun organisasi non-pemerintah itu sendiri, hingga komunitas lainnya. Juga dilanjutkan dengan mengulas Presidium Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan dan ditutup dengan ragam kebijakan pemerintahan di era masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono hingga masa kepemimpinan Joko Widodo dalam dimensi politik, hukum, dan HAM.

Bab IV membahas tentang aktivitas Aksi Kamisan baik di masa sebelum Pandemi Covid-19 hingga saat Pandemi Covid-19, serta dilanjutkan dengan pengaruh dan pemahaman Aksi Kamisan terhadap masyarakat.

Bab V merupakan bab penutup berisikan kesimpulan dan saran dari penulis dari seluruh bab yang ada dalam penelitian ini.⁴

